

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PULAU KALIMANTAN

Prima Rosita Arini S
STIE YKPN Yogyakarta
Email: sitarositaarini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang positif dari belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan ekonomi, dan belanja ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan (APBD) Pemerintah Daerah di Pulau Kalimantan tahun 2006 hingga tahun 2013. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis *Partial Least Square* (PLS). Pengujian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa: 1) Belanja Modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 2) Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, 3) Belanja Modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Kata kunci: Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat

THE EFFECT OF CAPITAL EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH AND COMMUNITY WELFARE ON THE ISLAND OF BORNEO

Prima Rosita Arini S
STIE YKPN Yogyakarta
Email: sitarositaarini@gmail.com

Abstract

This study aims to determine whether there is a positive influence of capital expenditure on economic growth, economic growth on economic welfare, and economic spending on the welfare of communities on the island of Borneo. Sources of data used are secondary data in the form of financial statements (APBD) Local Government on the island of Borneo in 2006 until 2013. Analysis technique used is by *Partial Least Square* (PLS) analysis. This test is conducted in all districts / cities in Kalimantan Island. From the test results obtained the results that: 1) Capital Expenditure has a negative and significant impact on Economic Growth, 2) Economic Growth has a negative and significant impact on Welfare Society, 3) Capital Expenditure has a positive and significant impact on the Welfare Society.

Keywords: Capital Expenditure, Economic Growth, Community Welfare

PENDAHULUAN

Penyusunan APBD dimulai dengan adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD

dan Prioritas dan Plafon Anggaran kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama

sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory dalam hal ini pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting (Darwanto, et al., 2007).

Pentingnya penyusunan anggaran akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang nantinya juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan apabila belanja modal dialokasikan secara tepat. Sehingga segala sesuatu hal yang dibutuhkan pada provinsi yang bersangkutan dapat terpenuhi. Dalam penelitian ini peneliti memilih Pulau Kalimantan sebagai sampel

penelitian dengan pertimbangan bahwa belum terlalu banyak peneliti yang meneliti Pulau Kalimantan dan selain itu Pulau Kalimantan memiliki Provinsi yang tersebar di kuadran satu, tiga, dan empat pada tipologi klassen. Peneliti ingin melihat apakah terjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh provinsi tersebut khususnya Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yang berada di kuadran empat yang memiliki arti bahwa daerah tersebut adalah daerah yang tertinggal yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki besaran PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan melihat bagaimana pengaruh yang terjadi pada Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Teori

Akhir-akhir ini, penelitian pada sektor publik juga banyak yang berfokus terhadap bagaimana kontribusi modal publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian ini modal publik suatu negara digambarkan dalam alokasi belanja modal. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* dalam hal ini pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting (Darwanto, et al., 2007).

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di

pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli. Menurut Halim (2007), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya.

Belanja modal dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dalam penelitian sebelumnya terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peneliti ingin melihat juga apakah di Pulau Kalimantan Belanja modal juga memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang umum dipergunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara berkembang karena pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam

masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kesejahteraan sosial merupakan cara untuk mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan individu dalam masyarakat (Badrudin, 2012). Maka dapat dikatakan bahwa apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2000).

Menurut Halim (2007) salah satu pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

Todaro (2006) mengatakan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran

pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah jika daerah tersebut selalu bisa memperbaiki infrastruktur yang ada di daerahnya. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan pendapatan perkapita. Selain itu meningkatnya belanja modal juga diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya sehingga akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Barro (1990) menyatakan bahwa investasi publik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian beberapa penelitian yang dilakukan menemukan bukti bahwa investasi publik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Banyak penelitian yang dilakukan di negara maju dan negara berkembang untuk melihat bagaimana hubungan statistik antara investasi

infrastruktur agregat dan pertumbuhan PDRB.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H1: Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran keadaan suatu perekonomian dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa (output) yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam penelitian ini khususnya adalah Pulau Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir mencakup semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode satu tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat

menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu daerah.

Selanjutnya ditambahkan oleh Mankiw (2006) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks ekonomi regional, ukuran yang sering dipergunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di wilayah itu.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB yang secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) juga merupakan perubahan nilai kegiatan ekonomi dari tahun untuk satu periode ke periode yang lain dengan mengambil rata-ratanya dalam waktu yang sama, maka untuk mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan

nasional dari tahun ke tahun. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di daerah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Apabila pertambahan pendapatan masyarakatnya meningkat dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Peran pemerintah dalam meningkatkan IPM juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik (Mirza, 2012). Peran pemerintah dalam kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Professor Kuznet salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 2006). Pertumbuhan output yang dimaksudkan

adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian yang dilakukan Sasana (2009) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah. Sedangkan Produk Domestik Bruto merupakan indikator yang dipakai mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara (Baibaba, 2008).

Menurut BPS, PDRB atas harga berlaku adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai

sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan teori-teori yang ada maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H2: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat didefinisikan sebagai suatu indeks gabungan yang meliputi tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam upaya pembangunan manusia, yaitu indikator kesehatan (dilihat dari indeks angka harapan hidup), indikator pendidikan (dapat dilihat dari rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf), indikator ekonomi (dapat dilihat dari pengeluaran riil per kapita). Ketiga indikator tersebut dianggap sangat mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non-fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja,

yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah (Christy, et al, 2009)

Penelitian yang dilakukan Sumiyati (2009) di Provinsi Jawa Barat mengenai Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil pengujian Zebua (2014) menunjukkan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa berpengaruh pada IPM dengan arah yang positif dan signifikan. Penelitian-penelitian sebelumnya mencerminkan bahwa struktur belanja APBD dapat dikatakan belum dialokasikan secara tepat dalam upaya peningkatan pembangunan kualitas manusia. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk mengetahui hubungan antara belanja modal dan IPM di suatu wilayah.

Zebua (2014) menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Mirza, 2012). Peningkatan alokasi belanja modal semestinya juga meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui IPM.

IPM menjadi sangat penting karena ditekankan pada manusia sebagai agen

perubahan dalam proses pembangunan suatu negara. Jika dapat diketahui pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; maka perbaikan tingkat kesejahteraan akan dapat diakselerasi.

Ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah belanja modal pemerintah dan investasi swasta. Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja sehingga akan memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun, lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar

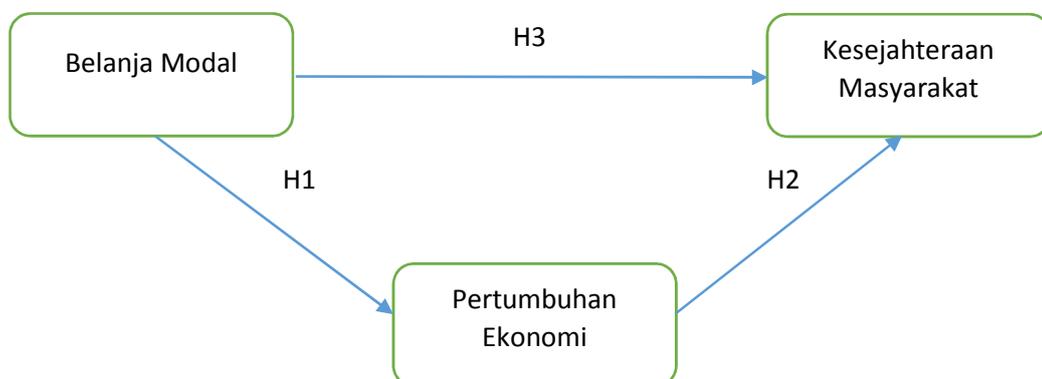
mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (national character building) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Penggunaan indikator kesejahteraan yang komprehensif dan akomodatif terhadap konsepsi pembangunan yang berkelanjutan sangat penting. Arah kebijakan peningkatan, perluasan dan pemerataan pendidikan untuk belanja modal dilaksanakan melalui antara lain; penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas. Kemajuan pendidikan ini dilihat dari indikator: dapat membaca dan menulis, penduduk usia sekolah, penduduk masih sekolah, sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan tamat sekolah (Badan Pusat Statistik, 2006).

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekati diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diharapkan.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H3: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, maka dibentuklah kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

METODE

Sumber dan Data Penelitian

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan berupa data Realisasi APBD dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Data yang diperoleh adalah data Belanja Modal, data PDRB, dan data Indeks Pembangunan Manusia Pulau Kalimantan. Karena keterbatasan atas tersedianya data, maka periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2006-2013. Data yang digunakan adalah dengan menggunakan sampel data 4 provinsi di Pulau Kalimantan kecuali Kalimantan Utara karena baru disahkan pada tanggal 25 Oktober 2012.

Variabel dan Definisi Operasional

Klasifikasi variabel didasarkan atas kajian teoritis dan empiris sebagai acuan kerangka berfikir yang terdiri dari dua variabel yaitu variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi operasi dalam suatu model ekonomi dan variabel tersebut tidak dipengaruhi oleh setiap hubungan yang digambarkan oleh model tersebut. Variabel Eksogen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal yang menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki definisi pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset

tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset;

Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah: (a) Variabel endogen *intervening* yang memiliki makna variabel yang ikut berpengaruh ketika variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen tergantung. Variabel endogen *intervening* dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan nilai PDRB atas harga berlaku suatu daerah. Menurut BPS, PDRB atas harga berlaku adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. (b) Variabel endogen tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen maupun variabel endogen *intervening*. Variabel endogen tergantung dalam penelitian ini adalah kesejahteraan

masyarakat. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini digambarkan dengan nilai

IPM suatu daerah. Menurut BPS, IPM memiliki definisi IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

ANALISIS DATA

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	Belanja Modal* (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi %	Kesejahteraan Masyarakat %
Mean	340320,19	5,73	71,62
Minimum	36593,75	-8,36	62,13
Maximum	23624390,60	22,39	79,87

*Keterangan: *) Dalam jutaan rupiah
Sumber: Output (data diolah, 2017)*

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 1, terlihat bahwa Belanja Modal di Pulau Kalimantan memiliki rata-rata sebesar Rp. 340.320.193.754, sedangkan nilai tertinggi Belanja Modal diwakili oleh Kabupaten Sukamara pada tahun 2013 sebesar Rp. 23.624.390.602.615, untuk nilai terendah pada Belanja Modal diwakili oleh Kabupaten Tapin tahun 2013 sebesar Rp. 36.593.746.359. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Pulau Kalimantan rata-rata terjadi sebesar 5,73%, dari angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan masih rendah. Pada tabel 1 terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi karena pada tingkat maksimum pertumbuhan ekonomi mampu

menunjukkan nilai sebesar 22,39% yang mewakili meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2006, namun nilai minimum yang diperoleh dari statistika deskriptif sangat jauh dengan nilai maksimum yaitu sebesar -8,36% yang justru menunjukkan pernah terjadi pertumbuhan ekonomi terendah di Kota Bontan pada tahun 2011. Angka kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan memiliki rata-rata sebesar 71,62%, tingkat kesejahteraan masyarakat tertinggi diwakili oleh Kota Balikpapan pada tahun 2013 sebesar 79,87% dan tingkat kesejahteraan masyarakat terendah diwakili oleh Kota Sambas pada tahun 2006 sebesar 62,13%

Analisis Induktif Dengan Partial Least Square (PLS)

Analisis induktif dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) meliputi penelitian *goodness of fit model (inner model)*, yang berfungsi untuk mengetahui kecocokan suatu model yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian *goodness of fit model* dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Nilai *goodness of fit model*

APC = 0,243, P<0,001	Good if P<0,05
ARS = 0,122, P<0,001	Good if P<0,05
AVIF=1,034	Good if ≤ 5

Sumber: Output (data diolah, 2017)

Berdasarkan hasil pengujian model, nilai *Average Path Coefficient (APC)* diperoleh hasil sebesar 0,243 dengan nilai P<0,001. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai ARS signifikan karena nilai P<0,05, sedangkan nilai 0,243 menunjukkan bahwa variabel pada penelitian hanya mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 24,3% dan sisanya sebesar 75,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel dalam penelitian. Nilai *Average R-Squared (ARS)* adalah sebesar 0,122 dengan nilai P<0,001, hal ini berarti APC memiliki nilai yang signifikan karena nilai P<0,05. Karena nilai APC yang dihasilkan

signifikan, maka dapat dibuktikan bahwa variabel endogen dan eksogen memiliki hubungan sebab dan akibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada model penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, hal tersebut terbukti dari adanya nilai *Average Variance Inflation Factor (AVIF)* sebesar 1,034 yang nilainya ≤ 5 .

Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

Pengujian untuk Hipotesis 1 dilakukan dengan menguji sampel seluruh kabupaten kota yang berada di pulau Kalimantan. Tabel 3 menunjukkan bagaimana hubungan antara Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Kalimantan. Hasil dari tabel tersebut menunjukkan bahwa ketika Hipotesis 1 diuji secara keseluruhan di Pulau Kalimantan, Belanja Modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari nilai koefisien jalur yang menunjukkan angka yang negatif yaitu sebesar -0,15 namun nilai p-value yang diperoleh adalah sebesar <0,01 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, dan angka p-value tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan adalah signifikan. Pengaruh negatif dan signifikan mungkin saja terjadi. Hal tersebut dikarenakan di Pulau Kalimantan

terjadi fenomena pertumbuhan ekonomi yang eksklusif.

Pertumbuhan ekonomi eksklusif dapat terjadi karena pembangunan yang dilakukan tidak berkualitas atau belum merata atau bisa jadi disebabkan karena meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam belanja modal namun tidak disertai dengan menurunnya angka kemiskinan atau pengangguran di Pulau Kalimantan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan 3 dari 4 provinsi yang berada di Kalimantan yaitu provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan pada tipologi klassen berada di kuadran 3 dan 4 yang menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut tingkat pertumbuhannya masih lambat. Sedangkan Kalimantan Tengah berada pada kuadran 1 yang menunjukkan bahwa daerah tersebut berkembang dengan cepat walaupun belum bisa mengalokasikan belanja modalnya dengan efisien sehingga PDRB per kapita yang dimiliki masih rendah. Namun pemerintah memberi perhatian khusus sehingga daerah yang berada di kuadran 1 masih memiliki peluang untuk berkembang lebih baik lagi. Maka dari hasil yang diperoleh dan analisis hasil dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat

Pengujian hipotesis yang kedua juga dilakukan dengan menguji seluruh kabupaten kota yang berada di Pulau Kalimantan. Tabel 3 menunjukkan bagaimana hubungan yang terjadi antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. Dari hasil yang diperoleh, apabila pengujian hipotesis dilakukan secara keseluruhan maka dalam Tabel 3 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar -0,17. Namun apabila dilihat dari tingkat signifikansi, pengaruh yang diberikan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai $p\text{-value} < 0,01$, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan oleh Professor Kuznet yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 2006).

Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan. Hasil pengujian hipotesis kedua ini juga tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2009) yang menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil di tabel 3 terlihat bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi justru memberi dampak penurunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa saja terjadi karena semua pemerintah kabupaten/kota yang berada di Pulau Kalimantan ketika menata pembangunan target output ekonomi, mereka hanya menggunakan asumsi bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi digambarkan dalam presentase tertentu. Jika target tersebut dapat dicapai atau bahkan dilewati, maka dapat dikatakan

bahwa pemerintah lokal kabupaten/kota berhasil mengelola kegiatan pemerintahan, di sisi lain, jika target pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai, maka dapat dikatakan pemerintah setempat belum berhasil dalam mengelola kegiatan pemerintahan, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka telah gagal.

Pada dasarnya hasil pembangunan ekonomi tidak hanya menunjukkan arah pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi tertentu. Badrudin (2011) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada kecepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan sosial. Itu sebabnya, Pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan perlu membedakan makna antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kedua istilah ini memiliki makna dan definisi yang berbeda sehingga dampak yang diberikan terhadap perekonomian kabupaten/ kota juga berbeda. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten/Kota Pulau Kalimantan tidak selalu menciptakan kekayaan bagi masyarakat.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Nasution (2007), Sasana (2009) dan Badrudin (2011). Sehingga dapat diambil keputusan bahwa hipotesis kedua tentang adanya

pengaruh positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan ekonomi tidak dapat diterima (ditolak).

Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis yang digambarkan di tabel 3 dapat dijelaskan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya nilai koefisien sebesar 0,41 dan nilai $p < 0,01$. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa meningkatnya belanja modal akan memberi dampak positif yaitu meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mirza (2012) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada IPM. Menurut Mirza

(2012) keterkaitan antara belanja modal dengan kesejahteraan masyarakat yang digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia sangat erat karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*national character building*) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan.

Tepatnya pengalokasian belanja modal seperti pembenahan infrastruktur daerah serta fasilitas umum yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sumiyati (2009) dan Zebua (2014).

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Koefisien	P-Value	Prediksi	Temuan	Kesimpulan
Belanja Modal → Pertumbuhan Ekonomi	-0,15	<0,01	+	-	Ditolak
Pertumbuhan Ekonomi → Kesejahteraan Masyarakat	-0,17	<0,01	+	-	Ditolak
Belanja Modal → Kesejahteraan Masyarakat	0,41	<0,01	+	+	Diterima

Sumber: Output (data diolah, 2017)

KESIMPULAN

Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi eksklusif dapat terjadi karena pembangunan yang dilakukan tidak berkualitas atau belum merata atau bisa jadi disebabkan karena meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam belanja modal namun tidak disertai dengan menurunnya angka kemiskinan atau pengangguran di Pulau Kalimantan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan 3 dari 4 provinsi yang berada di Kalimantan yaitu provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan pada tipologi kelas berada di kuadran 3 dan 4 yang menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut tingkat pertumbuhannya masih lambat. Sedangkan Kalimantan Tengah berada pada kuadran 1 yang menunjukkan bahwa daerah tersebut berkembang dengan cepat walaupun belum bisa mengalokasikan belanja modalnya dengan efisien sehingga PDRB per kapita yang dimiliki masih rendah.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tidak sesuai dengan pendapat Professor Kuznet yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 2006). Hasil

yang diperoleh dari pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi justru memberi dampak menurunnya nilai kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa saja terjadi karena semua pemerintah kabupaten/kota yang berada di Pulau Kalimantan ketika menata pembangunan target output ekonomi, mereka hanya menggunakan asumsi bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi digambarkan dalam presentase tertentu. Jika target tersebut dapat dicapai atau bahkan dilewati, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah lokal kabupaten/kota berhasil mengelola kegiatan pemerintahan, di sisi lain, jika target pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai, maka dapat dikatakan pemerintah setempat belum berhasil dalam mengelola kegiatan pemerintahan, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka telah gagal. Pada dasarnya hasil pembangunan ekonomi tidak hanya menunjukkan arah pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi tertentu. Badrudin (2011) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada kecepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan perlu membedakan makna antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kedua istilah ini memiliki makna dan

definisi yang berbeda sehingga dampak yang diberikan terhadap perekonomian kabupaten/ kota juga berbeda. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten/Kota Pulau Kalimantan tidak selalu menciptakan kekayaan bagi masyarakat.

Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Kalimantan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sumiyati (2009), Mirza (2012), dan Zebua (2014). Peningkatan alokasi belanja modal semestinya juga meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui IPM. IPM menjadi sangat penting karena ditekankan pada manusia sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan suatu negara. Jika dapat diketahui pengaruh belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; maka perbaikan tingkat kesejahteraan akan dapat diakselerasi. Ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah belanja modal pemerintah dan investasi swasta. Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya

diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

KELEMAHAN DAN SARAN

Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh yang diberikan oleh belanja modal. Sehingga kurang bisa menggambarkan bagaimana pengalokasian dana pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Pulau Kalimantan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain agar penelitian berikutnya semakin mampu memberikan gambaran keadaan yang sesungguhnya di Pulau Kalimantan terkait pengaruh pemasukkan pemerintah dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terjadi di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Baibaba, Yohanis. 2008. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan PDRB Propinsi Papua.
- Barro, Robert J. 1990. *Government Spending In a Simple Model of Endogenous Growth. The Journal of Political Economy*, 98.
- Badrudin, Rudy .2011, *'Effect of Fiscal Decentralization on Capital*

- Expenditure, Growth, and Welfare*, *Economic Journal of Emergeng Market*, vol. 3, no. 3, pp. 211-223.
- _____. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia.
- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Dewi, I G A Agung Astia dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Alokasi Belanja Rutin Dan Belanja Modal Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.14.1. Hal: 695-722
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat*.
- Halim, A., & Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah.
- Haryanto. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi UNTAN*. Volume 8.3 Hal: 144-155.
- Mankiw.2006. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1 (1), h:1-15.
- Nasution, Ade P., 2007. Peran dan Kompetensi Kemampuan Pemerintah terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batam.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.10.
- Sukirno, S. 2000. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumiyati, Euis Eti. 2009. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UNJANI*.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith. 2006. *Economic Development*. 9th Edition. New York: Pearson Addison Wesley.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial.

Wertianti, I G A Gede. 2013. Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi pada
Belanja Modal Dengan PAD dan
DAU Sebagai Variabel Moderasi.
E-Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana 4.3, pp: 567-584.

Zebua, Willman Fogati. 2014. Pengaruh
Alokasi Belanja Modal, Belanja
Barang Dan Jasa, Belanja Hibah
Dan Belanja Bantuan Sosial
Terhadap Kualitas Pembangunan
Manusia (Studi Pada Kabupaten
Dan Kota Di Wilayah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2011-2013).
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis. Universitas Brawijaya.

[<http://bps.go.id>]. Diakses 23 Juli 2016